

PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG

CrossMap
<http://www.crossmap.com>

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 -21007
SINTANG 78611



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

Tahun 2019

PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 -21007
SINTANG 78611**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Tahun 2019



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini dapat diselesaikan, sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2019, sekaligus sebagai alat umpan balik (*Feedback*) yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, guna meningkatkan kualitas dalam perencanaan program dimasa mendatang.

laporan ini menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya untuk menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dengan harapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya "***clean government dan good governance***".

Sintang, Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19630424 198403 2 008



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur.....	6
5. Sumber Daya Keuangan	9
6. Sarana dan Prasarana.....	9
B. Permasalahan Utama	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
B. Realisasi Anggaran	81
BAB IV : PENUTUP	84
Lampiran : 1. Formulir Perjanjian Kinerja	
2. Formulir Pengukuran Kinerja	



RINGKASAN EKSEKUTIF *(Eksekutif Summary)*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan jabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

Sesuai dengan RENSTRA Sekretariat daerah, terdapat 11 sasaran strategis yang harus diwujudkan dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

A. Kategori SANGAT BERHASIL

- 1) Terciptanya perundang- undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian produk perundang undangan (87,50);
- 2) Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya penyebarluasan informasi yang tepat, cepat dan akurat dengan melakukan kerjasama dengan mass media. (92,50);
- 3) Terlaksananya tata kelola yang efektif dalam pengelolaan batas wilayah negara, potensi dan infrastruktur wilayah perbatasan (92,50);
- 4) Tersusunnya Juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (88,75);
- 5) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental spritual, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan kerukunan antar umat beragama (92,50);
- 6) Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi (92,50);



- 7) Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah (92,50);
- 8) Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi(90,36)
- 9) Optimalisasi Penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancer (85,28)

B. Kategori BERHASIL

- 1) Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan daerah/Wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan (72,50);
- 2) Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan (78,75).

Dari 11 (sebelas) sasaran tersebut maka rata-rata capaian sasaran adalah 87,79 dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menggambarkan keberhasilan/kegagalan serta upaya pencapaian sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019. Secara umum RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dapat dilaksanakan secara baik dengan memberdayakan segala aspek yang ada dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sintang yaitu:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021.

Oleh karena itu, LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 yang disusun ini, diharapkan dapat memberikan dayaguna, baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun bagi peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya mewujudkan “**Good Governance**” serta dapat dijadikan bahan masukan untuk penetapan perencanaan program selanjutnya.



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Data pegawai ASN di Lingkungan Setda Kabupaten Sintang	9
Tabel I.2	Data Sarana dan Prasarana Setda kabupaten Sintang	10
Tabel III.1	Indikator Pencapaian Kinerja Setda Kabupaten Sintang	36
Tabel III.2	Indikator Pencapaian Sasaran 1	42
Tabel III.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja	44
Tabel III.5	Indikator Pencapaian Sasaran 2	46
Tabel III.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi Kinerja	48
Tabel III.8	Indikator Pencapaian Sasaran 3	49
Tabel III.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja	50
Tabel III.11	Indikator Pencapaian Sasaran 4	51
Tabel III.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel III.13	Perbandingan Realisasi Kinerja	53
Tabel III.14	Indikator Pencapaian Sasaran 5	53
Tabel III.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel III.16	Perbandingan Realisasi Kinerja	55
Tabel III.17	Indikator Pencapaian Sasaran 6	57
Tabel III.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
Tabel III.19	Perbandingan Realisasi Kinerja	59
Tabel III.20	Indikator Pencapaian Sasaran 7	61
Tabel III.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63



Tabel III.22	Perbandingan Realisasi Kinerja	64
Tabel III.23	Indikator Pencapaian Sasaran 8	66
Tabel III.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
Tabel III.25	Perbandingan Realisasi Kinerja	67
Tabel III.26	Indikator Pencapaian Sasaran 9	68
Tabel III.27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71
Tabel III.28	Perbandingan Realisasi Kinerja	71
Tabel III.29	Indikator Pencapaian Sasaran 10	74
Tabel III.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
Tabel III.31	Perbandingan Realisasi Kinerja	76
Tabel III.32	Indikator Pencapaian Sasaran 11	78
Tabel III.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
Tabel III.34	Perbandingan Realisasi Kinerja	80
Tabel III.35	Realisasi Anggaran Setda Tahun 2019	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH.

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun berdasarkan Amanat Peraturan Predisen Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada umumnya.

Dengan disusunnya LKjIP Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum Sekretariat Daerah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Sekretariat Daerah yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.



3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Atas terbitnya Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Unsur pimpinan, adalah Sekretaris Daerah.
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Asisten Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b). Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
 - c). Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan.
 - 2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.



- 3) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Humas, Peliputan dan Pemberitaan;
 - b). Sub Bagian Protokol; dan
 - c). Sub Bagian Penghubung.
 - 4) Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan;
 - b). Sub Bagian Pengelolaan Potensi Perbatasan; dan
 - c). Sub Bagian Batas Negara dan Kerjasama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Membawahi :
- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - b). Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Agama;
 - b). Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - c). Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Energi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - b). Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Alam.
 - 4) Bagian Pengadaan, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b). Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Lelang dan Evaluasi.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- 1) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Perlengkapan; dan



- c). Sub Bagian Rumah Tangga.
- 2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Kelembagaan;
 - b). Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c). Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
- 3) Bagian Program dan Keuangan
 - a). Sub Bagian Perencanaan; dan
 - b). Sub Bagian Keuangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional.

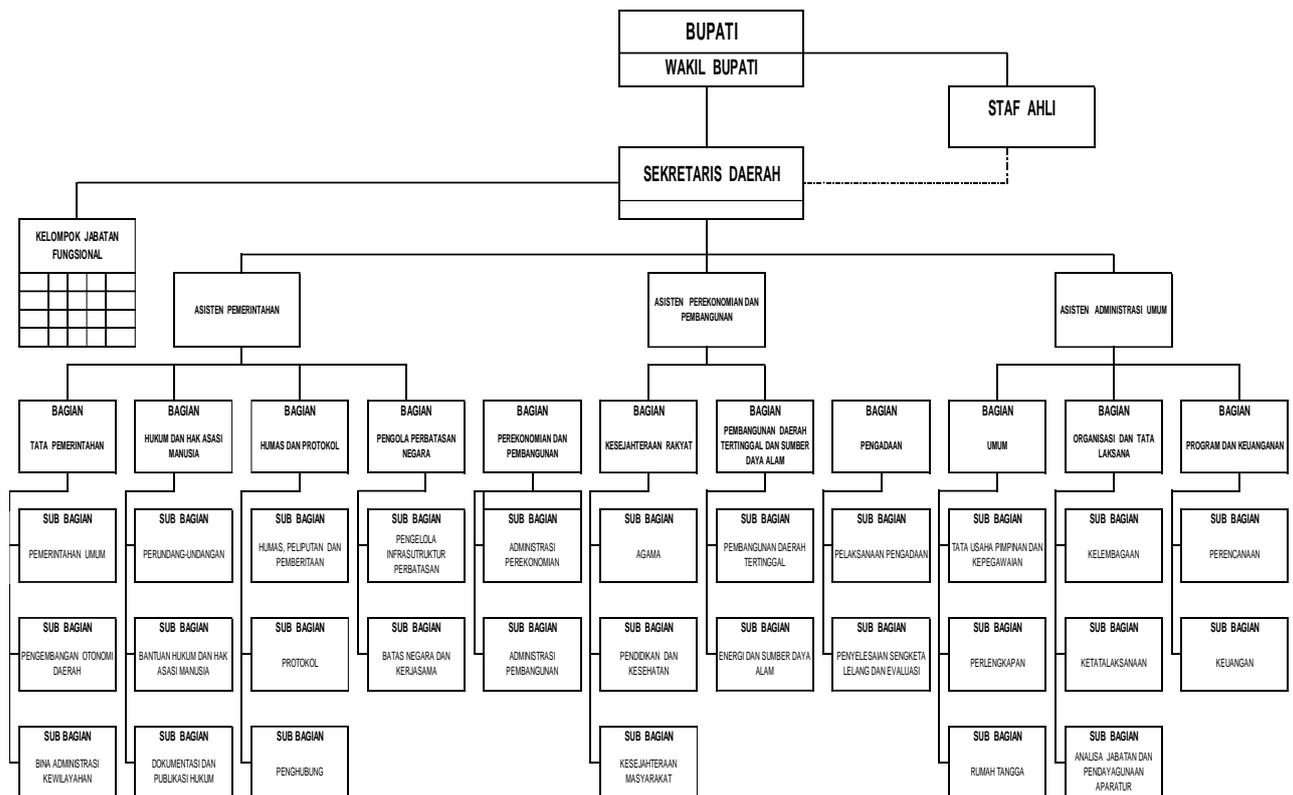
Sebagai informasi sesuai perkembangan bahwa Bagian Pengelola Perbatasan Negara telah keluar dari struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada bulan September 2019, berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang tanggal 21 Pebruari 2019.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada bagan berikut ini.



Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;



- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara dan instansi daerah;
- e. Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran;
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga perangkat daerah dengan instansi vertikal;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan pengembangan otonomi daerah;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Sekretariat Daerah;
- j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- l. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan sekretariat;
- m. Pelaksanaan Sistem pengendalian internal; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan aset utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi, selain metode maney dan sarana/prasarana. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia, karena



manusia sebagai sumber daya apartur yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik dan tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan menjalani kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Begitu pula halnya dengan peningkatan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan sumber daya apartur yang handal dan berkompeten dalam bidang tugasnya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 153 orang pegawai negeri sipil (PNS) keadaan 31 Desember 2019, dengan komposisi sebagai berikut :

a. Dan segi pangkat/golongan ruang, terdiri dari :

1) Golongan I	=	3 orang
2) Golongan II	=	35 orang
3) Golongan III	=	94 orang
4) Golongan IV	=	21 orang
Jumlah	=	153 orang

b. Dari segi kualifikasi pendidikan, terdiri dari :

1) S.2	=	39 orang
2) S.1	=	49 orang
3) D.IV	=	9 orang
4) D.III	=	8 orang
5) D.II	=	- orang
6) D.I	=	1 orang
7) SLTA	=	41 orang
8) SLTP	=	3 orang
9) SD	=	3 orang
Jumlah	=	153 orang

c. Dari segi jabatan struktural/eselon, adalah sebagai berikut :

1) Eselon II	=	4 orang
--------------	---	---------



2) Eselon III	=	9 orang
3) Eselon IV	=	28 orang
4) Non Eselon	=	112 orang
Jumlah	=	153 orang

d. Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Pim, dengan rincian sebagai berikut :

1) Diklat Pim II	=	7 orang
2) Diklat Pim III	=	11 orang
3) Diklat Pim IV	=	18 orang

e. Selain PNS, Setda Kabupaten Sintang, dibantu oleh pegawai non organik (tenaga kontrakan) berjumlah 165 orang, terdiri dari :

a. Tenaga administrasi dan teknis perkantoran	=	64 orang
b. Tenaga kebersihan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, gedung serba guna, PBSI, Sekretariat PKK, Bandara Tebelian, Balai Ruai, Taman Rumah Jabatan Bupati, Ajudan Supir, Humas Setda, gedung Pancasila, mess pemda Sintang di Pontianak, PJU dan Kantor Penghubung Sintang di Pontianak	=	60 orang
c. Tenaga harian lepas – tenaga bantu	=	41 orang
Jumlah	=	165 orang



Tabel. I.1

**DATA PEGAWAI APARTUR NEGARA DI LINGKUNGAN SETDA
KABUPATEN SINTANG**

NO	ESELON / NON ESELON	PENDIDIKAN									GOLONGAN			
		S.2	S.1	D.IV	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ESELON II	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
2.	ESELON III	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
3.	ESELON IV	17	9	-	1	-	-	1	-	-	7	21	-	-
	JUMLAH	30	9	0	1	-	0	1	0	0	20	21	0	0
4.	NON ESELON	9	40	9	7	-	1	40	3	3	1	73	35	3
	JUMLAH	39	49	9	8	-	1	41	3	3	21	94	35	3

Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 didukung Anggaran yang berseumber dari APBD Kabupaten Sintang yang dialokasikan dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebesar Rp. 76.333.928.846 terdiri dari :

1. Anggaran belanja tidak langsung sebesar RP. 14.872.900.905,-
2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 61.461.027.941,-

6. Sarana dan prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagaimana tabel I.1 berikut ini :



Tabel I.2

DATA SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah dan bangunan	130 buah	Terdiri dari : Hak milik, Hak pakai, Pengolahan
1.	Kendaraan roda enam	2 unit	
2.	Kendaraan roda empat	21 unit	
3.	Kendaraan roda dua	60 unit	
4.	Kendaraan air bermotor	4 unit	
5.	Personal komputer	63 unit	
6.	Lap top	69 unit	
7.	Printer	25 unit	
8	UPS	13 unit	
9.	Proyektor	1 unit	
10.	Meja ½ Biro	4 unit	
11.	Kursi Tamu 321 + Meja	1 unit	
12.	AC Split	6 unit	
13.	Kipas Angin	1 unit	

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai permasalahan utama (Strategic Issued) yaitu :

1. Belum optimalnya pengorganisasian terhadap masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD, dan pelayanan publik. Terhadap masalah tersebut dilakukan penguatan kepada OPD, Surat, sosialisasi, maupun rapat koordinasi.
2. Belum optimal pelayanan administrasi kepada perangkat daerah terhadap masih relatif lama proses surat/dokumen yang ditangani di Setda untuk mendapatkan putusan/tanda tangan pejabat yang berwenang.

Terhadap permasalahan tersebut dilakukan upaya-upaya berupa rapat koordinasi antar Bagian / Asisten, penguatan kepada personil yang menangani tugas dan konsisten terhadap SOP yang di jalankan.



3. Masih rendahnya koordinasi antar Bagian / Asisten yang mengakibatkan kurang cepatnya penanganan masalah kebijakan yang diajukan OPD. Terhadap permasalahan tersebut dilakukan penguatan koordinasi internal bagian/asisten baik melalui Medsos (WA) maupun rapat koordinasi antar Asisten/Bagian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan dan Program yang akan dicapai. RENSTRA juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Setda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur staf, membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik (good governance).

1. VISI

Sejalan dengan fungsi Setda Kabupaten Sintang selaku unsur staf, membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, dengan demikian Setda Kabupaten Sintang menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang. Selanjutnya baru dijabarkan kedalam misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai RENSTRA Setda Kabupaten Sintang 2016-2021.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021"



Visi tersebut diatas mempunyai makna :

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2017-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2017-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan luas ke depan dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan



lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2017-2021 adalah : rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGL, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Religius adalah keadaan di mana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2017-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat dan (3) pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2017-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase



koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan di mana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2017-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi dan informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah dan (4) reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

2. Misi

Guna mewujudkan visi, maka telah dirumuskan misi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.



2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Sintang yang terkait dengan tujuan, sasaran, rencana strategis dan kebijakan Setda Kabupaten Sintang adalah misi yang ke 6 yaitu :

" Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan



misi yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pemerintahan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai.
- 2) Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan, perumusan, dan penelaahan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati, melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian Masalah/ Kasus/ sengketa hukum serta penertiban hukum, dokumentasi hukum dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah.
- 3) Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuhkembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 4) Meningkatnya tatakelola yang efektif dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara.
- 5) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan personil bidang perekonomian dan pembangunan yang mantap, profesional dan akuntabel.
- 6) Meningkatnya pembinaan dan pembangunan mental spirituil, pengadministrasian, bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
- 7) Meningkatnya pengadaan dan pelayanan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- 8) Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang, tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah.
- 9) Meningkatnya pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, sarana dan prasarana kerja untuk menunjang



perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

10) Terwujudnya penyusunan/penyelenggaraan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

11) Tersusunnya program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi yang lancar.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah selama 5 (lima) Tahun periode 2016–2021 adalah sebagai berikut :



- 1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pemerintahan yang baik untuk yang didukung oleh sasaran dan prasarana fisik yang memadai” adalah ***Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan.*** Dengan indikator sasaran adalah :
 - a) Tingkat persiapan, kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru.
 - b) Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang.
 - c) Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan.

- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan, perumusan dan penelaahan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati, melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian masalah/kasus/sengketa hukum serta penertiban hukum, dokumentasi hukum dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah” adalah ***Terciptanya Perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan.*** Dengan indikator sasaran adalah :
 - a) Persentase Raperda yang telah di Perda kan.
 - b) Tingkat penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai tuntas.
 - c) Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola.



- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “ Meningkatkan kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuhkembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan” adalah **Terwujudnya 20okum20 pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat.** Dengan 20okum2020or sasaran sebagai berikut :
- Persentase jumlah informasi dan kegiatan yang diliput/diberitakan.
 - Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat.
- 4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “ Meningkatkan tatakelola yang efektif dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara” adalah **Terlaksananya tatakelola yang efektif dalam pengelolaan batas wilayah negara, potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan.** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang.
 - Tingkat pembangunan wilayah perbatasan.
 - Tingkat kualitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan.
 - Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan.
- 5) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kelancaran pelaksanaan personil bidang perekonomian dan pembangunan yang mantap, profesional dan akuntabel”, adalah **Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran**



pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian.
 - b) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan.
 - c) Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan perekonomian sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya.
 - d) Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya.
- 6) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan "Meningkatnya pembinaan dan pengembangan mental spiritual, pengadministrasian, bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan" adalah ***Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental, spirituil, pengadministrasi bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Tingkat pengetahuan/ketrampilan penerima bantuan dalam penyusunan SPJ.
 - b) Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang.
 - c) Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif.
 - d) Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
 - e) Tingkat kerukunan umat beragama.



- f) Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan.
 - g) Evaluasi mahasiswa ikatan dinas.
 - h) Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan beasiswa.
- 7) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan "Meningkatnya pengadaan dan pelayanan yang baik didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai" adalah ***Terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat.
 - b) Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c) Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan.
 - d) Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - e) Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.
 - f) Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.
 - g) Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa.



- h) Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.
- 8) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pembangunan daerah tertinggal yang lebih optimal, tepat dan berimbang” adalah ***Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang, tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumberdaya alam di daerah.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Jumlah dokumen profil daerah tentang pembangunan daerah.
 - b) Jumlah dokumen pra study kelayakan.
 - c) Potensi sumber daya energi.
- 9) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan administrasi keuangan”, ***Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah
 - b) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah
 - c) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap bagian di lingkungan Setda.



- d) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di Lingkungan Setda.
 - e) Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa
 - f) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai
 - g) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan
 - h) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin
 - i) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai
 - j) Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja.
 - k) Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
 - l) Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan "Terwujudnya penyusunan/penyelenggaraan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi", adalah ***Tersusun/terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta serta kinerja dan reformasi birokrasi.*** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
- a) Jumlah Rancangan Perda dan Peraturan Bupati SOPD dan SOTK.
 - b) Jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun.
 - c) Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun.
 - d) Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik
 - e) Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan.
 - f) Persentase pengauatan sakiip.
 - g) Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi.



11) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan “optimalnya penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi yang lancar” adalah ***Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi yang lancar***. Dengan indikator sasaran adalah :

- a) Jumlah laporan keuangan Setda yang disusun.
- b) Jumlah dokumen rencana kerja Setda.
- c) Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Setda.
- d) Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Setda.
- e) Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Setda.
- f) Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda.
- g) Tersusunnya dokumen anggaran Setda.
- h) Tersusunnya rencana kerja tahun 2016-2021.
- i) Jumlah Surat Keputusan pendukung.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja.

Adapun strategi yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Hukum dan HAM.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan bidang kehumasan dan protokol.
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan bidang kawasan perbatasan.



5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan.
7. Meningkatkan efektivitas kebijakan pengkoordinasian, strategi pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang barang/jasa pemerintah.
8. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumberdaya alam.
9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib dan lancar tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional kepegawaian.
10. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan/penyelenggaraan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
11. Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan yang lancar, efisien dan efektif.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak pihak terkait yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan sasaran "Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan**



instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang administrasi.

2. Untuk melaksanakan sasaran "Terciptanya perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Pembinaan, Penataan, Perumusan, Penelaahan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi Hukum dan Bantuan Hukum.***
3. Untuk melaksanakan sasaran "Terwujudnya sistem pendokumentasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya penyebarluasan informasi yang tepat, cepat dan akurat dengan melakukan kerjasama dengan mass media", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: ***Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan unit kerja/instansi di bidang kehumasan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.***
4. Untuk melaksanakan sasaran "Terlaksananya tatakelola yang efektif dalam pengelolaan batas wilayah negara, potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan. Ditetapkan kebijakan sebagai berikut : ***Mengkoordinir dan memfasilitasikan perkembangan dikawasan perbatasan dengan ditunjang pelaksanaan pembangunan yang lebih komprehensif***".
5. Untuk melaksanakan sasaran "Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan



pembangunan”, ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Mengkoordinir dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dalam rangka menyusun kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan.**

6. Untuk melaksanakan sasaran “ Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental, spirituil, pengadministrasi bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan” ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang agama, Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental, spirituil, pengadministrasi bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.**
7. Untuk melaksanakan sasaran “Terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi.” Ditetapkan kebijakan sebagai berikut : **Memfasilitasi dan mengkoordinir kebijakan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.**
8. Untuk melaksanakan sasaran “Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang, tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumberdaya alam di daerah” ditetapkan kebijakan sebagai berikut : **Memfasilitasi dan mengkoordinir kebijakan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah.**
9. Untuk melaksanakan sasaran “ Meningkatkan pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris daerah serta pelayanan administrasi”, ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka**



urusan perawatan dan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelayanan administrasi dan operasional kepegawaian.

10. Untuk melaksanakan sasaran " penyusunan/penyelenggaraan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan administratif dalam penyusunan penyelenggaraan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.**
11. Untuk melaksanakan sasaran " Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi yang lancar.", ditetapkan kebijakan sebagai berikut: **Mengkoordinir dan memfasilitasi program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar, efisien dan efektif di lingkungan Setda.**

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan disepakati pula ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, yang memuat program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Adapun sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan daerah/Wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat persiapan, kesiapan dan kelayakan pembentukan Kecamatan baru- Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang- Tingkat Kejelasan dan kepastian batas kecamatan	90% 80% 85%
2.	Terciptanya perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian produk perundang undangan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Raperda yang telah di Perdakan- Tingkat Penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai tuntas- Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola	100% 100% 100%
3.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya penyebaran informasi yang tepat, cepat dan akurat dengan melakukan kerjasama dengan mass media.	<ul style="list-style-type: none">- Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan- Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	100% 100%
4.	Terlaksananya tata kelola yang efektif dalam pengelolaan batas wilayah negara, potensi dan infrastruktur wilayah perbatasan.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang- Tingkat pembangunan wilayah perbatasan.- Tingkat kualitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan.- Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan.	100% 100% 100% 100%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.	Tersusunnya Juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian- Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan- Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan perekonomian sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya- Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	100% 100% 100% 100%
6.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental spritual, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat pengetahuan keterampilan penerima bantuan dalam penyusunan SPJ- Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang- Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif- Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat- Tingkat kerukunan umat beragama- Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan	100% 100% 100% 100% 100% 100%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi mahasiswa ikatan dinas- Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa	100% 100%
7.	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi.	<ul style="list-style-type: none">- Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat- Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah- Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan- Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah- Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang- Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang- Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa	100% 80% 100% 100% 100% 100% 1 dok



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		- Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang	80%
8.	Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Profil daerah tentang pembangunan daerah- Jumlah Dokumen Pra Study Kelayakan Potensi Sumber Daya Energi	1 Dok 1 Dok
9.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah- Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap bagian di lingkungan Setda- Tingkat kelayakan sarana dan prasarana Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah- Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan- Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<ul style="list-style-type: none">- Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin- Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja- Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku- Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
10.	Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah rancangan perda perangkat daerah dan perbup SOTK Perangkat Daerah- Jumlah analisis jabatan perangkat Daerah yang disusun- Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun- Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik- Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan- Persentase Penguatan SAKIP- Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>1 dok</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p>
11.	Optimalisasi Penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun- Jumlah dokumen rencana kerja Sekretariat Daerah- Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah- Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah	<p>100%</p> <p>1 dok</p> <p>100%</p> <p>100%</p>



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<ul style="list-style-type: none">- Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah- Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah- Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah- Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021- Jumlah Surat Keputusan pendukung	<p>2 Dok</p> <p>2 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>2 Dok</p>



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 diukur sesuai dengan mekanisme perhitungan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil perhitungan capaian kinerja serta analisisnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Indikator Pencapaian Kinerja Setda Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1. Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru	%	90	50	55,56	62,50
2. Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang		%	80	60	75,00	77,50	
3. Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan		%	85	65	76,47	77,50	
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						69,01	72,50
2.	Terciptanya Perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan.	1. Prosentase Raperda yang telah di Perdakan	%	100	100	100	92,50
2. Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas		%	100	100	100	92,50	
3. Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola		%	100	80	80	77,50	
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						93,33	87,50



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat.	1. Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan	%	100	100	100	92,50
		2. Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	%	100	100	100	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100,00	92,50
4.	Terlaksananya tata kelola yang efektif dalam pengelolaan batas negara, potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan.	1. Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang.	%	100	99,28	99,28	92,50
		2. Tingkat pembangunan wilayah perbatasan.	%	100	100	100	92,50
		3. Tingkat kualitas pengelolaan potensi perbatasan.	%	100	99,28	99,28	92,50
		4. Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan.	%	100	100	100	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						99,64	92,50
5.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	1. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian	%	100	85	85	77,50
		2. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan	%	100	90	90	92,50
		3. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	100	90	90	92,50
		4. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	100	90	90	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						88,75	88,75



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental,spirituil, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.	1. Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ 2. Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang 3. Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif 4. Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. 5. Tingkat kerukunan umat beragama 6. Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan 7. Evaluasi mahasiswa ikatan dinas 8. Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa.	%	100	100	100	92,50
			%	100	100	100	92,50
			%	100	100	100	92,50
			%	100	100	100	92,50
			%	100	100	100	92,50
			%	100	100	100	92,50
			%	100	100	100	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100,00	92,50
7.	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi.	1. Persentase penyebaran bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat. 2. Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan. 4. Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.	%	100	94,75	94,75	92,50
			%	80	80	100	92,50
			%	100	99,65	99,65	92,50
			%	100	98,98	98,98	92,50
			%	100	94,66	94,66	92,50



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.	%	100	94,66	94,66	92,50
		7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa.	dok	1	1	100	92,50
		8. Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.	%	80	80	100	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						97,84	92,50
8.	Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah	1. Jumlah dokumen profil daerah tentang pembangunan daerah.	dok	1	1	100	92,50
		2. Jumlah dokumen Pra Study Kelayakan Potensi Sumber Daya Energi.	dok	1	1	100	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100,00	92,50
9.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.	1. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.	%	100	80	80	77,50
		2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah	%	100	80	80	77,50
		3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang.	%	100	80	80	77,50
		4. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang	%	100	85	85	77,50
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa	%	100	76	76	77,50



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	100	79	79	77,50
		7. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	100	80	80	77,50
		8. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.	%	100	70	70	77,50
		9. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	100	75	75	77,50
		10. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	%	100	70	70	77,50
		11. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	%	100	80	80	77,50
		12. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.	%	100	100	100	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						79,58	78,75
10.	Tersusun/Terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.	1. Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK.	%	100	100	100	92,50
		2. Jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun.	%	100	100	100	92,50
		3. Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun.	dok	1	1	100	92,50
		4. Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik	%	90	80	88,89	92,50
		5. Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan.	%	100	80	88,89	92,50
		6. Persentase penguatan Sakip.	%	80	80	100	92,50
		7. Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi	%	80	70	87,5	92,50
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						93,77	90,36



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	1. Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun.	dok	1	1	100	92,50
		2. Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	100	92,50
		3. Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	100	92,50
		4. Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah.	dok	2	2	100	92,50
		5. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	100	92,50
		6. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah.	dok	2	2	100	92,50
		7. Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah.	dok	1	1	100	92,50
		8. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021	dok	1	1	100	92,50
		9. Jumlah Surat Keputusan Pendukung	dok	2	6	300	92,50
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL"						116,67	85,28

Kesimpulan dari hasil pengukuran terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana tabel di atas yaitu :

- Sangat Berhasil = 9 sasaran
- Berhasil = 2 sasaran
- Tidak berhasil = 0 (tidak ada)



2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran : 1

TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PENATAAN DAERAH/WILAYAH, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PEMERINTAH KECAMATAN

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.2

Indikator Pencapaian Sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1. Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru 2. Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang 3. Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	% % %	90 80 85	50 60 65	55,56 75,00 76,47
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						69,01

1) Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru

Capaian indikator tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru sebesar 55,56%, dapat dikategorikan **cukup berhasil**. Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru masih dihadapkan dengan penyingkronan batas wilayah serta penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.

2) Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang

Capaian indikator kinerja kejelasan dan kepastian tapal batas daerah Kabupaten Sintang sebesar 75% dapat dikategorikan Berhasil. Indikator kinerja kejelasan dan kepastian tapal batas wilayah administrasi pemerintah mempertegas cakupan wilayah administrasi



yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, agar terwujud pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

3) Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan

Capaian indikator kinerja tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan sebesar 76,47%, dapat dikategorikan “Berhasil”. Dalam pelaksanaannya tingkat penetapan batas kecamatan semakin ditingkatkan sehingga kelangsungan proses administrasi kewilayahan masyarakat semakin jelas.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1. Peningkatan kerja sama antar daerah	113.342.320	109.907.270	96,97		
		2. Peningkatan Siste Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.088.427.180	1.049.080.394	99,01		
		3. Penataan daerah otonomi baru	615.180.390	573.886.107	93,29		
		Rata-rata			96,42		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,42% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 69,01%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Realisasi Tahun 2018 dan Target Akhir Tahun 2021



Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	
1	2	3	4	6	6	7	
1	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan	1	Tingkat persiapan dan kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru	%	55,56	55,56	95
		2	Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang	%	75	75	80
		3	Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	%	76,47	76,47	85

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecahan masalah

- a) Hambatan atau penurunan pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
- Hambatan terjadi dikarenakan adanya tarik menarik kedua belah pihak yang berbatasan, yang memiliki sumber daya alam yang potensial dan juga tidak memiliki atau belum memiliki peta maupun tanda batas sebelumnya, baik itu antar Kecamatan, Kabupaten maupun antar Provinsi lainnya
 - Terbatasnya tenaga teknis pemetaan.
 - Kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur jalan serta luasnya wilayah Kabupaten Sintang.
- b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala:
- Untuk mewujudkan batas wilayah administrasi yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik dilapangan perlu diambil langkah-langkah penyelesaian tapal batas wilayah pemerintah terendah dimulai dari desa/kelurahan, merupakan dasar yang menentukan batas wilayah kecamatan, batas wilayah kabupaten/kota, batas provinsi dan batas wilayah negara.
 - Pemerintah Kabupaten Sintang harus mencabut Perda No. 1 Tahun 2015 tentang pemekaran Kabupaten dan diusulkan kembali ke Provinsi Kalbar untuk permohonan rekomendasi dari Gubernur.



- 3) Melakukan koordinasi kembali kepada SKPD yang belum atau lama menyerahkan data, mengadakan koordinasi ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar.
- 4) Melakukan koordinasi dan pendekatan politik kepada pemerintah, dalam hal ini ke Mendagri dan juga ke DPR RI Dapil Kalbar.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Adapun pencapaian yang dihasilkan sebagai berikut:

Berkenaan dengan penegasan batas daerah antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau dan Melawi perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegasan batas yang sudah diselesaikan yakni masalah antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan:
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 407/Pem/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang.
- b. Perselisihan batas Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau khususnya pada segmen batas antara Dusun Sunsong Desa Nanga Biadan Kecamatan Sekadau Hulu penyelesaiannya merupakan kewenangan Gubernur.
- c. Perselisihan batas wilayah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sanggau khususnya di Kecamatan Ketungau Hulu dengan Kecamatan Sekayam merujuk pada Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 125.3/1604/Pem-C Tanggal 10 Juni 2011 perihal penegasan Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang.
- d. Sedangkan sengketa Batas Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan inventarisasi dan mempelajari dokumen sebagai landasan proses selanjutnya.



Sasaran : 2

TERCIPTANYA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM SERTA DOKUMENTASI HUKUM MELALUI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENGKAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III. 5

Indikator Pencapaian Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Terciptanya Perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan.	1. Persentase Raperda yang telah di Perdakan 2. Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas 3. Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola	% % %	100 100 100	100 100 80	100 100 125
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						93,33

- 1) Persentase Raperda Yang Telah diperdakan
Capaian indikator kinerja persentase raperda yang telah diperdakan sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil** .
Raperda yang telah diperdakan atau yang telah diundangkan dalam lembaran daerah yaitu 10 Perda dari target 10 perda.
- 2) Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas
Capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai tuntas sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
Tingkat Penyelesaian kasus atau perkara yang ditangani sampai tuntas pada tahun 2019 ada 7 perkara yang diselesaikan di pengadilan negeri dan semuanya terselesaikan dengan hasil 100%.



- 3) Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola.

Capaian indikator Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola sebesar 80% dapat dikategorikan **berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
2.	Terciptanya Perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.438.476.466	2.396.576.220	99,30		
		2. Bantuan Hukum	1.239.370.520	1.222.410.114	98,63		
		Rata-rata			98,97	93,33	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,97% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 86,25%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Dengan Realisasi Tahun 2018 Dan Target Akhir 2021

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3		4	6	6	7
2	Terciptanya Perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum, dan pengkajian produk perundang-undangan.	1.	Persentase Raperda yang telah di Perdakan	%	100	100	100
2.		Tingkat penyelesaian kasus/ perkara yang ditangani sampai tuntas	%	46,66	100	100	
3.		Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	%	90	80	100	

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecacahan masalah

a. Hambatan dalam pencapaian sasaran

1. Perkara Perdata Nomor : 7/PDT.G/2018/PN-STG merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pemerintah Daerah tidak boleh mengintervensi proses perkara yang sedang berjalan.
2. Perkara TUN Nomor : 61/G/2018/PTUN.PTK, proses masih berjalan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara)
3. Perkara Perdata Nomor : 31/PDT.G/2018/PN-STG, proses masih berjalan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sintang).

b. Upaya yang dilakukan :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri yang membidangi melalui media elektronik.
2. Mengikuti proses peradilan sesuai dengan Hukum Acara.



Sasaran : 3

TERWUJUDNYA SISTEM PENDOKUMENTASIAN TERPADU PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN, SERTA TERWUJUDNYA PELAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOL YANG TEPAT CEPAT DAN AKURAT.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III. 8

Indikator Pencapaian Sasaran 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
'3	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat.	1. Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan 2. Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	% %	100 100	100 100	100 100
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100,00

- 1) Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan
Capaian indikator kinerja Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan sebesar 100% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.
- 2) Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat
Capaian indikator kinerja Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat sebesar 100% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.



2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
3.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat	1. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	185.759.850	185.020.700	90,60		
		2. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	55.338.764	43.446.824	78,51		
		3. Kerjasama informasi dan media massa	5.050.281.880	5.004.169.950	99,09		
		Pengembangan data/informasi	112.184.350	103.974.000	92,68		
Rata-rata					90,22	100	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90,22% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan realisasi tahun 2018 dan target akhir 2021

Tabel III. 10

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	6	6	7
3	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat cepat dan akurat.	1. Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan	%	86,73	51	98
		Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang	%	94,74	2	95



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecacahan masalah

- Dalam pelaksanaan tugas masih terkendala dengan minimnya sarana yang tersedia saat ini, karena sarana tersebut tidak dapat difungsikan secara maksimal seperti belum dapat mengakses internet untuk mengedit berita dilapangan.
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang ke lapangan sering tidak dapat dimonitor oleh Subbag Protokol.
- Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan unit kerja / instansi di bidang protokol dan komunikasi pimpinan, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Bagian Informasi dan Komunikasi telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran. Pencapaian sasaran dalam program dan kegiatan tersebut selama tahun 2019 telah dicapai 100 persen.

Sasaran : 4

TERLAKSANANYA TATA KELOLA YANG EFEKTIF DALAM PENGELOLAAN BATAS NEGARA, POTENSI DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III. 11

Indikator Pencapaian Sasaran 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Terlaksananya tata kelola yang efektif dalam pngelolaan batas negara, potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan.	1. Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang. 2. Tingkat pembangunan wilayah perbatasan. 3. Tingkat kualitas pengelolaan potensi perbatasan. 4. Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan.	% % % %	100 100 100 100	99,28 100 99,28 100	99,28 100 99,28 100
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						99,64



- 1) Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang
Capaian Indikator Kinerja Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 2) Tingkat pembangunan wilayah perbatasan
Capaian Indikator Kinerja Tingkat pembangunan wilayah perbatasan sebesar 99,28% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 3) Tingkat kualitas pengelolaan potensi perbatasan
Capaian Indikator Kinerja Tingkat kualitas pengelolaan potensi perbatasan sebesar 99,28% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan
Capaian Kinerja Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 12

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
4.	Terlaksananya tata kelola yang efektif dalam pengelolaan batas negara, potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan	1. Pengembangan wilayah perbatasan	697.660.100	690.331.527	98,95		
		2. Kerja sama Pembangunan	143.695.650	140.510.467	97,78		
		Rata-rata			98,37		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,37% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,64%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Dengan Realisasi Tahun 2018 dan Target Akhir 2021

Tabel III.13
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	
1	2	3	4	6	6	7	
4	Terlaksananya tata kelola yang efektif dalam pengelolaan batas negara, potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan.	1	Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang.	%	99,28	99,28	100
		2	Tingkat pembangunan wilayah perbatasan.	%	100	100	100
		3	Tingkat kualitas pengelolaan potensi perbatasan	%	99,28	99,28	100
		4	Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan	%	90	100	100

Sasaran : 5

TERSUSUNNYA JUKNIS PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK KELANCARAN PEMBINAAN DAN PROSES ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Perbandingan Antara terget dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III. 14

Indikator Pencapaian Sasaran 5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	
5.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang	1.	Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian	%	100	85	85
		2.	Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan	%	100	90	90
		3.	Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil	%	100	90	90



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	perekonomian dan pembangunan	perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya 4. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	100	90	90
Capaian Kinerja Sasaran 'SANGAT BERHASIL'						88,75

- 1) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian
Capaian indikator kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian sebesar 85% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.
- 2) Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan
Capaian indikator kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan sebesar 90% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 3) Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya.
Capaian indikator kinerja Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya sebesar 90% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya
Capaian indikator kinerja Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya sebesar 90% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 15

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
5.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	236.243.500	210.909.390	89,28		
		2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	175.957.100	175.058.500	99,49		
		3. Perencanaan Pembangunan daerah	302.774.920	287.881.150	95,08		
		Rata-rata			94,62		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,62% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 88,75%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Dengan Realisasi Tahun 2018 Dan Target Akhir 2021

Tabel III. 16

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	6	6	7
5	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	1. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian	%	93,91	85	100
		2. Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan	%	94,83	90	100
		3. Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil perekonomian sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	96,76	90	100



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	6	6	7
		4 Tingkat pemanfaatan data dan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	%	81,44	90	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecacahan masalah

a. Hambatan

Kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait serta sulitnya mendapatkan data yang akurat untuk perencanaan dan valuasi.

b. Upaya Yang dilakukan dapat dilakukan dalam mengatasi masalah adalah meningkatkan koordinasi antar OPD terkait sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan program kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

c. Pencapaian yang dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Terasiliasinya penyelesaian masalah bidang perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Sintang tahun 2019.
- 2) Tersedianya data dan informasi proses penyelesaian masalah bidang investasi di Kabupaten Sintang.
- 3) Tersusunnya Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun 2019.
- 4) Terlaksananya program Raskin tahun 2019 di Kabupaten Sintang.



Sasaran : 6

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MENTAL, SPIRITUIL, PENGADMINISTRASIAN BANTUAN KEAGAMAAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III. 17

Indikator Pencapaian Sasaran 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
6.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental,spirituil, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.	1. Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ	%	100	100	100
		2. Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang	%	100	100	100
		3. Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif	%	100	100	100
		4. Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.	%	100	100	100
		5. Tingkat kerukunan umat beragama	%	100	100	100
		6. Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan	%	100	100	100
		7. Evaluasi mahasiswa ikatan dinas	%	100	100	100
		8. Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa.	%	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100,00

- 1) Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ
Capaian indikator kinerja Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



- 2) Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang
Capaian indikator kinerja Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 3) Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif
Capaian indikator kinerja Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat
Capaian indikator kinerja Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 5) Tingkat kerukunan umat beragama
Capaian indikator kinerja Tingkat kerukunan umat beragama sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 6) Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan
Capaian indikator kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 7) Evaluasi mahasiswa ikatan dinas
Capaian indikator kinerja Evaluasi mahasiswa ikatan dinas sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 8) Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa
Capaian indikator kinerja Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa sebesar 100% dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Tabel III. 18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
6.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental,spirituil, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	1. Peningkatan di bidang kesejahteraan rakyat	42.324.800	513.205.180	79,90	100	
		2. Peningkatan kerukunan beragama	1.426.464.248	1.418.861.280	99,47		
		3. Pendidikan tinggi	913.549.200	879.481.152	88,58		
		Rata-rata			89,32		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 89,32% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **sudah efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan realisasi tahun 2018 dan target akhir 2021

Tabel III. 19

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	
1	2	3	4	6	6	7	
6	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental,spirituil, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	1	Tingkat pengetahuan ketrampilan penerimaan bantuan dalam penyusunan SPJ	%	100	100	100
		2	Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang	%	100	100	100
		3	Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif	%	100	100	100
		4	Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat		100	100	100



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
		5 Tingkat kerukunan umat beragama		100	100	100
		6 Tingkat ketersediaan data dan informasi penerima bantuan		100	100	100
		7 Evaluasi mahasiswa ikatan dinas		100	100	100
		8 Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa		100	100	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecacahan masalah

a. Kendala dan hambatan dalam mencapai sasaran

- 1) Belum terkoordinir secara maksimal lembaga, ormas-ormas keagamaan di Kabupaten Sintang.
- 2) Masih adanya penerima hibah yang belum mengerti membuat laporan pertanggungjawaban pengguna dana hibah.
- 3) Koordinasi Tim UKS belum berjalan dengan baik, serta kurangnya respon dan pemahaman pihak sekolah dalam melaksanakan dan mendukung kegiatan UKS.
- 4) Kurangnya informasi dari pihak UNTAN mengenai laporan perkembangan mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan.

b. Upaya yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Rutin diadakannya rapat koordinasi serta adanya kendaraan operasional.
- 2) Peningkatan pemberian pemahaman membuat laporan.
- 3) Mengintensifkan koordinasi dengan panitia penerimaan mahasiswa Perguruan Tinggi yang melaksanakan Program kerjasama.
- 4) Mengintensif Koordinasi serta meningkatkan pemahaman dan motivasi sekolah mengenai program UKS.
- 5) Menyarankan kepada pihak UNTAN untuk melakukan pertemuan secara berkala dengan Pemkab/Pemkot selaku penyumbang dana kemahasiswaan termasuk menyampaikan progres mahasiswa kedokteran jalur ikatan dinas.



c. Analisis keberhasilan Sasaran :

Adapun pencapaian yang dihasilkan dalam mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu terlaksananya semua kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya cukup efektif.

Sasaran : 7
TERLAKSANANYA PELAKSANAAN PENGADAAN DAN
PELAYANAN SENGKETA LELANG DAN EVALUASI.

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019

Tabel III. 20

Indikator Pencapaian Sasaran 7

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
7.	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi.	1. Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat. 2. Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan. 4. Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang. 6. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.	% % % % % %	100 80 100 100 100 100	94,75 80 99,65 98,98 94,66 94,66	94,75 92,50 99,65 98,98 94,66 94,66



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa.	dok	1	1	100
		8. Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.	%	80	80	100
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						97,84

- 1) Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat
Capaian indikator kinerja Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat sejumlah 94,75% dapat dikategorikan **Sangat berhasil**.
- 2) Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah
Capaian indikator kinerja Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sejumlah 99,99% dapat dikategorikan Sangat berhasil.
- 3) Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
Capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan sejumlah 99,65% dapat dikategorikan Sangat berhasil.
- 4) Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
Capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sejumlah 98,98% dapat dikategorikan Sangat berhasil.
- 5) Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang
Capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang sejumlah 94,66% dapat dikategorikan Sangat berhasil.



- 6) Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang
- Capaian indikator kinerja Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang sejumlah 94,66% dapat dikategorikan Sangat berhasil.
- 7) Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa
- Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa sejumlah 100% dapat dikategorikan Sangat berhasil.
- 8) Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.
- Capaian indikator kinerja Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang sejumlah 100% dapat dikategorikan Sangat berhasil.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
7.	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi	1. Pengembangan data/informasi /ststistik daerah	2.438.476.466	2.396.576.220	99,30		
			Rata-rata			99,30	97,84

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,30% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,84%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan realisasi tahun 2018 dan target akhir 2021

Tabel III. 22
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
7.	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan dan pelayanan sengketa lelang dan evaluasi.	<p>1. Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang / Jasa pemerintah kepada masyarakat.</p> <p>2. Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>3. Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan.</p> <p>4. Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.</p> <p>6. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang.</p> <p>7. Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa.</p> <p>8. Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa lelang.</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>dok</p> <p>%</p>	<p>97,44</p> <p>98,87</p> <p>99,26</p> <p>95,51</p> <p>98,79</p> <p>87,94</p> <p>1</p> <p>80</p>	<p>94,75</p> <p>80</p> <p>99,65</p> <p>98,98</p> <p>94,66</p> <p>94,66</p> <p>1</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>1</p> <p>90</p>

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Hambatan serta pemecacahan masalah



a. Hambatan

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memahami tentang Pengadaan barang/jasa.
- 2) Belum adanya Kelompok Kerja (Pokja) Permanen yang masih bersifat Ad Hoc (Pinjaman dari SKPD lainnya)
- 3) Masih belum adanya aturan yang mengatur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lelang yang digunakan untuk memfasilitasi permasalahan lelang yang dilaksanakan oleh Pokja dimana pihak penyedia merasakan dirugikan dalam pelelangan dengan mengajukan sanggah/aduan untuk disampaikan dan diketahui oleh yang berkompeten dalam pelaksanaan.
- 4) Perlu adanya laporan bulanan hasil lelang untuk setiap tahap pelelangan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Pengadaan Pengadaan.

b. Upaya yang harus dilakukan :

- 1) Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Penempatan/Pemindahan, Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sebagai Staf di Bagian Pengadaan.
- 3) Harus adanya aturan yang mengatur dalam memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lelang.
- 4) Perlu adanya peran provinsi untuk mengadopsi untuk Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pelaporan Monev, dimana monev sudah diatur di dalam e-monev melalui online yang dikelola oleh Pejabat Penghubung masing-masing Kabupaten/Kota.

c. Analisis keberhasilan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang dan jasa.
- 2) Tersedianya tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 3) Terasilinasinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 4) Terkoordinirnya pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 5) Tersedianya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.



Sasaran : 8

TERSUSUNNYA PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF, BERIMBANG TEPAT DAN OPTIMAL UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019

Tabel III. 23
Indikator Pencapaian Sasaran 8

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
8.	Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah	1. Jumlah dokumen profil daerah tentang pembangunan daerah. 2. Jumlah dokumen Pra Study Kelayakan Potensi Sumber Daya Energi.	dok dok	1 1	1 1	100 100
Capaian Kinerja Sasaran "SANGAT BERHASIL"						100,00

- 1) Jumlah dokumen profil daerah tentang pembangunan daerah
Capaian kinerja Jumlah dokumen profil daerah tentang pembangunan daerah sebesar 100 % dapat dikategorikan sangat berhasil.
- 2) Jumlah dokumen Pra Study Kelayakan Potensi Sumber Daya Energi
Capaian kinerja jumlah dokumen pra study kelayakan potensi sumber daya energi sebesar 100% dapat dikategorikan sangat berhasil

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Tabel III. 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
8.	Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah	1. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	200.437.300	2.240.000	1,21		
		Rata-rata			1,21	100	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 1,21% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **sudah efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan realisasi tahun 2018 dan target akhir 2021

Tabel III. 25
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
8.	Tersusunnya perumusan kebijakan yang komprehensif, berimbang tepat dan optimal untuk pembangunan daerah tertinggal, energi dan sumber daya alam di daerah	1. Jumlah dokumen profil daerah tentang pembangunan daerah.	dok	1	1	1
		2. Jumlah dokumen Pra Study Kelayakan Potensi Sumber Daya Energi.	dok	1	1	1

4. Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target sasaran

- 1) Secara umum Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai Kabupaten Daerah Tertinggal termasuk hampir semua kecamatan dan Desa-desanya yang ada Kegiatan Penyusunan dan Analisa Profil Daerah Tertinggal banyak kendala pada tingkat koordinasi baik dengan instansi terkait maupun masyarakat desa yang menjadi sasaran kegiatan, dimana data yang disampaikan seringkali berbeda dengan data-data yang didapat secara langsung di lapangan.



- 2) Dalam kegiatan Pra Study Pembangunan Tanaman Hutan Rakyat (TAHURA), tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut pada tahun 2019 dikarenakan kesalahan pengentrian nama kegiatan yang seharusnya Taman Hutan Raya (TAHURA) dibuat nama kegiatan Tanaman Hutan Rakyat.
- 3) Tidak bisa mengandalkan kegiatan yang sudah menjadi urusan pemerintah provinsi di bidang ESDA.

5. Upaya yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Meningkatnya intensitas koordinasi dan sosialisasi data-data yang dapat disusun sebagai sebuah perencanaan Rencana Aksi Daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal yang nantinya akan menjadi Rencana Aksi Nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- b. Bagian Sumber Daya Alam mengusulkan kembali kegiatan Taman Hutan Raya (TAHURA) untuk tahun anggaran 2020.

Sasaran : 9

TERLAKSANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN YANG TERTIB DAN LANCAR, TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019

Tabel III. 26

Indikator Pencapaian Sasaran 9

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
9.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang.	%	100	80	80
			%	100	80	80
			%	100	80	80



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		4. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang	%	100	85	85
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa	%	100	76	76
		6. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	100	79	79
		7. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	100	80	80
		8. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.	%	100	70	70
		9. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	100	75	75
		10. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	%	100	70	70
		11. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	%	100	80	80
		12. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.	%	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran "BERHASIL"						79,58

- 1) Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah
Capaian indikator kinerja Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 2) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah
Capaian indikator kinerja Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.



- 3) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang
Capaian indikator kinerja Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 4) Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang
Capaian indikator kinerja Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang sebesar 85%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 5) Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa
Capaian indikator kinerja Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa sebesar 76%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 6) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai sebesar 79%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 7) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 8) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin sebesar 70%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 9) Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai sebesar 75%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 10) Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja
Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.
- 11) Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku
Capaian indikator kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku sebesar 100%, dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



- 12) Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebesar 80%, dapat dikategorikan **berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 27

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
9.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah	1. Pelayanan administrasi perkantoran	20.540.606.490	17.680.462.086	86,08		
		2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14.169.310.000	11.560.725.600	81,59		
		3. Peningkatan disiplin aparatur	220.620.000	219.228.000	99,40		
		4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	567.224.803	379.664.120	66,93		
		5. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil KDH	8.173.104.740	7.902.696.972	96,69		
		Rata-rata					

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86,14% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 79,58%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan realisasi tahun 2018 dan target akhir 2021

Tabel III. 28

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
9.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan	1. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah.	%	80	80	100
		2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana	%	80	80	100



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
	prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi dan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah.	gedung kantor milik pemerintah				
		3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana disetiap Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang.	%	85	80	100
		4. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Setda Kabupaten Sintang	%	76	85	100
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa	%	79	76	100
		6. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	80	79	100
		7. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	70	80	100
		8. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.	%	75	70	100
		9. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	70	75	100
		10. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	%	80	70	100
		11. Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.	%	90	80	100
		12. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.	%	100	100	100

4. Kendala dan hambatan :

- Rendahnya tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam disiplin kerja dan pengisian absen harian.
- Rendahnya kesadaran ASN dalam penyimpanan data personal untuk pembaharuan (Update) data pegawai.



- c. Kurangnya tenaga teknis membidangi membidangi beberapa kegiatan misalnya kearsipan.
- d. Pengelolaan arsip masih belum optimal.
- e. Kurangnya tenaga teknis yang membidangi urusan domestik rumah pimpinan.
- f. Tenaga Fungsional sedikit sekali menguasai teknologi sehingga pelayanan pada masyarakat lebih banyak bersifat manual.
- g. Minimnya sarana yang dimiliki sehingga pelayanan terhadap pimpinan sering kurang optimal.
- h. Inventarisasi aset pada rumah tangga masih belum optimal.

5. Upaya yang dilakukan dan pemecahannya :

- a. Perlu adanya sanksi langsung berupa pemotongan kesejahteraan pegawai.
- b. Menyiapkan surat edaran terkait update data pegawai dan menghimbau secara langsung kepada ASN.
- c. Mengirim staf untuk mengikuti kursus teknis kearsipan.
- d. Mengoptimalkan kinerja tenaga arsiparis sesuai tupoksinya.
- e. Menunjuk staf aparatur sipil negara (ASN) untuk khusus mengelola kearsipan secara profesional
- f. Penganggaran untuk diklat teknis terkait pelayanan rumah tangga pimpinan
- g. Penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi pada tugas pokok dan fungsi tenaga fungsional umum yang berkaitan langsung pada pelayanan masyarakat
- h. Menyusun program kerja prioritas dalam rangka peningkatan kinerja tenaga fungsional umum pada rumah tangga pimpinan.
- i. Mengoptimalkan tenaga pembantu pengurus barang pada masing-masing rumah tangga pimpinan.

6. Analisis pencapaian kinerja sasaran

Untuk pencapaian sasaran memfasilitasikan dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka urusan perawatan dan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian, serta pelayanan administrasi dan operasional Sekeretariat Daerah, perlu didukung dengan dana yang memadai serta diperlukan kerjasama antara unsur pimpinan dan staf, sehingga terwujud sistem administrasi, pelayanan kepegawaian, pemenuhan kebutuhan sarana dan parasarana perkantoran serta pelayanan sistem administrasi yang baik.



Sasaran : 10

TERSUSUN/TERSELENGGARANYA KEBIJAKAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN, PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA SERTA KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019

Tabel III. 29

Indikator Pencapaian Sasaran 10

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
10.	Tersusun/Terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.	1. Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK. 2. Jumlah Analisis Jabatan perangkat Daerah yang disusun. 3. Standar kompetensi jabatan yang disusun 4. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan. 6. Persentase penguatan SAKIP Kabupaten 7. Persentase pelaksanaan Percepatan reformasi birokrasi	% % dok % % % %	100 100 1 90 100 80 80	100 100 1 80 80 80 70	100 100 100 88,89 80 100 87,50
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						93,77

1) Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK

Capaian indikator kinerja Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2) Jumlah Analisis Jabatan perangkat Daerah yang disusun

Capaian indikator kinerja Jumlah Analisis Jabatan perangkat Daerah yang disusun sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



- 3) Standar kompetensi jabatan yang disusun
Capaian indikator kinerja Standar kompetensi jabatan yang disusun sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Persentase penyelenggaraan pelayanan publik
Capaian indikator kinerja Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 5) Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan
Capaian indikator kinerja Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan sebesar 80% sehingga dapat dikategorikan **berhasil**.
- 6) Persentase penguatan SAKIP Kabupaten
Capaian indikator kinerja persentase penguatan sakip sebesar 75% dapat dikategorikan **berhasil**.
- 7) Persentase pelaksanaan Percepatan reformasi birokrasi
Capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi sebesar 75% dapat dikategorikan **berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.30

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
10.	Tersusun/Terselenggara kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi	1. Mengintensifkan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan publik	49.839.000	49.017.300	98,35		
		2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	77.354.000	75.228.041	97,33		
		3. Pembinaan dan pengembangan aparatur daerah	285.727.470	266.993.970	93,00		
		Rata-rata			92,61		



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,61% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 93,77%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **belum efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan realisasi tahun 2018 dan target akhir 2021

Tabel III. 31

Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
10.	Tersusun/Terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah rancangan Perda dan Perbup SOP dan SOTK.2. Jumlah Analisis Jabatan perangkat Daerah yang disusun.3. Standar kompetensi jabatan yang disusun4. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik.5. Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan.6. Persentase penguatan SAKIP Kabupaten7. Persentase pelaksanaan Percepatan reformasi birokrasi	<p>%</p> <p>%</p> <p>dok</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>70</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>90</p> <p>75</p> <p>80</p> <p>80</p>

4. Hambatan dan kendala

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah regulasi tentang pembentukan organisasi perangkat daerah sering berubah dan terlalu cepatnya permintaan untuk mengimplementasikan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat.

5. Analisis pencapaian sasaran :

- Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sintang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau dengan skor 82,03
- Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap unit penyelenggara pelayanan,



juga menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, masing DPMPTSP Kab. Sintang dengan kategori B (baik), Dinas DUKCAPIL Kab. Sintang dengan kategori B dan RSUD Ade M Djoen Sintang dengan kategori A.

- Keberhasilan tersebut sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
- Adapun pencapaian kinerja yang dihasilkan melalui Sub Bagian Kelembagaan adalah ditetapkannya 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah OPD) dan Peraturan Bupati tentang SOTK beberapa OPD.
- PERDA dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang
 2. Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang
 3. Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang



Sasaran : 11

OPTIMALISASI PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA ANGGARAN DAN PELAPORAN SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG LANCAR

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019

Tabel III. 32

Indikator Pencapaian Sasaran 11

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7
11.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	1. Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun. 2. Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah. 3. Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah. 4. Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah. 5. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah. 6. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah. 7. Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah. 8. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021 9. Jumlah Surat Keputusan Pendukung	dok dok dok dok dok dok dok dok dok	1 1 1 2 1 2 1 1 2	1 1 1 2 1 2 1 1 6	100 100 100 100 100 100 100 100 300
Capaian Kinerja Sasaran " SANGAT BERHASIL "						116,67

- 1) Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 2) Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.



- 3) Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 4) Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 5) Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 6) Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 7) Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah
Capaian indikator kinerja Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 8) Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021
Capaian indikator kinerja Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021 sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.
- 9) Jumlah Surat Keputusan Pendukung
Capaian indikator kinerja Jumlah Surat Keputusan Pendukung sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
11.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar	1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	285.727.470	266.993.970	93,00		
			Rata-rata		93,00	116,67	



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 116,67%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya **sudah efisien**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 Dengan Realisasi Tahun 2018 Dan Target Akhir 2021

Tabel III. 34
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
11.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	1. Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun. 2. Jumlah dokumen rencana kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah. 3. Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah. 4. Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah. 5. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah. 6. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah. 7. Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah. 8. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021 9. Jumlah Surat Keputusan Pendukung	dok dok dok dok dok dok dok dok dok	1 1 1 2 2 2 1 1 6	1 1 1 2 2 2 1 1 6	1 1 1 2 2 2 1 1 7

4. Analisis Pencapaian sasaran

Mengkoordinir kegiatan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan.

Adapun pencapaian yang dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Adanya laporan keuangan Setda.
- 2) Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Setda.
- 3) Adanya laporan pencapaian kinerja dan Anggaran Setda.
- 4) Adanya laporan semesteran dan realisasi Anggaran Setda.



- 5) Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Setda.
- 6) Adanya laporan keuangan akhir tahun Setda.
- 7) Tersusunnya dokumen anggaran setda.
- 8) Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2016-2021.
- 9) Adanya Surat Keputusan Pendukung.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menetapkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sebesar Rp. 76.333.928.486,00 terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung Rp. 14.872.900.905,00, terealisasi sebesar Rp. 14.161.980.937,00 atau 95,22%, dan
2. Belanja langsung Rp. 61.461.027.041,00, terealisasi sebesar Rp, 54.606.474.011,00 atau 88,85%.

Realisasi anggaran belanja langsung dalam program untuk mencapai sasaran kinerja selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 35

Realisasi Anggaran Setda Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pendidikan Tinggi	913.549.200	879.481.152	88,58
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	236.243.500	210.909.390	89,28
3.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media Massa	185.759.850	185.020.700	90,60
4.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	55.338.764	43.446.824	78,51
5.	Program Kerjasama Data Informasi Massa	5.050.281.880	5.004.169.950	99,09
6.	Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah Pembakuan nama-nama Rupabumi	101.974.300	91.155.700	89,39
7.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	200.437.300	2.240.000	1,21



No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
8.	Program Pengembangan Data/Informasi	112.184.350	103.974.000	92,68
9.	Program Kerjasama Pembangunan	143.695.650	140.510.467	97,78
10.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	697.660.100	690.331.527	98,95
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	302.774.920	287.881.150	95,08
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	175.957.100	175.058.500	99,49
13.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.540.606.490	17.680.462.086	86,08
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	14.169.310.000	11.560.725.600	81,59
15.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	220.620.000	219.288.000	99,40
16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	567.224.803	379.664.120	66,93
17.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan	285.727.470	266.993.970	93
18.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	8.173.104.740	7.902.696.972	96,69
19.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	1.088.427.180	1.049.080.394	96,38
20.	Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik	49.839.000	49.017.300	98,35
21.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	113.342.320	109.907.270	96,97
22.	Program penataan Peraturan Undang-undangan	2.438.476.466	2.393.574.220	98,16
23.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	615.180.390	573.886.107	93,29
24.	Program Peningkatan Hari Nasional dan Daerah	933.617.600	801.461.985	85,84



No. 1	Program 2	Anggaran 3	Realisasi 4	% 5
25.	Program Bantuan Hukum	1.239.370.520	1.222.410.114	98,63
26.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	704.181.000	575.772.012	81,76
27.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	77.354.000	75.288.041	97,33
28.	Program Pemerintahan Peningkatan di bidang kesejahteraan rakyat	642.324.800	513.205.180	79,9
29.	Program Peningkatan Kerukunan Beragama	1.426.464.248	1.418.861.280	99,47
	Jumlah Belanja Daerah	61.461.027.941	54.606.474.011	88,65



BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa, selama tahun 2019 dari sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat dikategorikan sangat berhasil.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2021 secara bertahap berkomitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi-Pemerintah Kabupaten Sintang.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran, dapat dikatakan sangat berhasil. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur, 9 sasaran dikategorikan **sangat berhasil** dan 2 sasaran dikategorikan **berhasil**. Hal ini tentunya menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah untuk dapat bekerja menjadi lebih baik lagi dalam mencapai sasaran strategis.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merumuskan beberapa langkah penting sebagai **upaya pemecahan masalah** yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dalam upaya untuk meningkatkan kedalaman berakuntabilitas.
- b. Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
- c. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan yang tersedia akan lebih diberdayakan
- d. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya Pembangunan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi sehingga lahir visi dan misi pembangunan.
- e. Peningkatan sumber daya manusia, penyempurnaan infrastruktur dan perangkat aparatur Pemerintah Daerah.



- f. Lebih meningkatkan efektifitas dan re-efisiensi program sebagai proses manajemen, antara lain :
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam **Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator kinerja Utama** yang telah ditetapkan.
 - 2) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
 - 4) Pengembangan kemampuan otonomi daerah dengan berbagi program atau kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; program atau kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan program atau kegiatan penguatan lembaga non pemerintah, dalam rangkaian mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan baik.